

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Koperasi adalah badan hukum dengan melandaskan setiap kegiatannya dengan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan . Istilah koperasi berasal dari kata *Cooperation* atau *Cooperative* yang berarti bekerjasama, jadi setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab dalam operasional pada koperasi itu dan memiliki hak suara yang sama dalam mengambil keputusan. Pengertian koperasi menurut Rudianto (2010: 30) :

- a) Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian anggota.
- b) Merupakan bentuk kerjasama dalam koperasi yang bersifat sukarela.
- c) Masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- d) Semua anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan dan mengawasi usaha koperasi tersebut.

- e) Resiko dan keuntungan usaha harus ditanggung dan dibagi secara adil.

Dapat diartikan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan bentuk kerjasama antara anggota dengan koperasi yang mana anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengembangkan dan mengawasi usaha dalam koperasi itu sendiri.

2.1.2 Tujuan koperasi

Koperasi adalah sebagai suatu organisasi ekonomi dan sosial yang harus patuh terhadap hukum yang berlaku (dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992) Koperasi diharapkan untuk mampu mencapai tujuan :

- a) Membangun dan mengembangkan potensi atau kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b) Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat untuk sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- d) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan dengan demokrasi ekonomi.

2.1.3 Fungsi Koperasi

Setiap badan usaha pasti memiliki fungsi tersendiri, begitu juga pada koperasi Menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 fungsi koperasi adalah :

- a) Membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud sesuai dengan angan-angan.
- b) Koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup para anggota dan masyarakat.
- c) Dapat memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional di mana koperasi menjadi kunci pondasinya.
- d) Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik, dengan cara melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.4 Prinsip Koperasi

Menurut pada undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dan undang-undang Nomor 12 Tahun 1996 prinsip dasar koperasi sudah tercantum sebagai berikut :

- a) Anggota koperasi yang bersifat terbuka dan sukarela.
- b) Proses pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.

- c) Pemberian balas jasa kepada seluruh anggota disesuaikan dengan modal anggota tersebut.
- d) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang mengedepankan rasa keadilan sesuai dengan kinerja dari masing-masing anggota.

2.1.5 Jenis Koperasi

Menurut Rudianto (2010:5) apabila jika dilihat dari bidang usaha dan jenis anggotanya dikelompokkan menjadi empat jenis diantaranya:

a) Koperasi simpan pinjam

Koperasi kredit atau yang sering di katakana koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan dana tersebut. Kegiatan koperasi simpan pinjam merupakan wadah untuk menyediakan jasa berupa penyimpanan dan peminjaman dana pada para anggota koperasi.

b) Koperasi konsumen

Koperasi konsumen merupakan koperasi yang anggotanya terdiri atas para konsumen akhir atau merupakan pemakaian barang atau jasa. Kegiatan utama pada koperasi konsumen adalah melakukan pembelian secara bersama.

c) Koperasi pemasaran

Koperasi pemasaran merupakan koperasi yang para anggotanya terdiri dari produsen atau yang pemilik barang berupa penyedia

jasa. Koperasi pemasaran dibentuk dengan tujuan untuk membantu para anggotanya guna memasarkan barang yang mereka hasilkan.

d) Koperasi produsen

Koperasi produsen merupakan koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi untuk bekerja sama dalam satu tujuan koperasi ini untuk mengasihkan dan memasarkan barang maupun jasa. Kegiatan utama dari koperasi produsen ini adalah menyediakan, mengoperasikan dan untuk mengelola sarana produksi bersama.

2.1.6 Jenis simpanan

a) Simpanan pokok

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 27 (revisi 1998) tentang perkoperasian adalah simpanan pokok ini hanya dilakukan sekali selama akan menjadi anggota dan jumlah simpanan pokok setiap anggota ditentukan oleh kebijakan koperasi ini sendiri sesuai dengan peraturan yang dibahas pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) .

b) Simpanan wajib

Simpanan wajib Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang harus wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh koperasi tersebut. Simpanan ini wajib dibayarkan secara rutin

setiap jangka waktu yang ditentukan , semisal sebulan sekali. Dan apabila uang yang sudah masuk pada simpanan wajib ini tidak bisa diambil atau ditarik kembali oleh anggota koperasi selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan ini dapat diambil apabila anggota tersebut sudah keluar dari keanggotaan koperasi.

c) Simpanan sukarela

Simpanan ini bersifat bebas atau bisa dikatakan sukarela (tidak wajibkan) bagi semua anggota, pembayarannya pun bebas bisa dapat dilakukan kapan saja, dan simpanan ini dapat diambil kembali oleh anggotanya pada setiap saat.

2.2 Pengendalian

2.2.1 Pengertian Pengendalian Internal

Mulyadi (2013:164) Pengertian pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, serta mendorong efisiensi dalam mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) Pengertian pengendalian intern menurut AICPA meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta

kekayaan, yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong diatautinya kebijakan perusahaan yang telah diterapkan.

Pengertian pengendalian intern menurut (COSO: 2013) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui: efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.

Dapat disimpulkan pengendalian internal merupakan suatu pondasi bagi setiap badan usaha atau perusahaan yang khususnya perusahaan yang menyediakan kredit dikarenakan hal ini dapat melindungi suatu aset lancar dari perusahaan mulai dari kas, piutang dan persediaan.

2.2.2 Ruang Lingkup Pengendalian Internal

Dalam teori yang ada pada kerangka kerja COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) yang mengemukakan pendapat bahwa pengendalian intern merupakan suatu pengendalian kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan untuk mencapai suatu tujuan secara efisien, yang terdiri dari suatu kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dari operasi perusahaan COSO mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) komponen kebijakan dan

prosedur yang didesain dan diimplementasikan untuk penerapan suatu perusahaan guna untuk mencapai tujuan pengendalian intern kelima komponen tersebut diantaranya:

a) Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian ini meliputi suatu sikap dari manajemen dan karyawan perusahaan tentang betapa pentingnya sebuah pengendalian internal dalam sebuah perusahaan (COSO: 2013). Lingkungan pengendalian adalah faktor-faktor yang meliputi integritas, nilai-nilai etika, komitmen terhadap kompetisi, filosofi manajemen dan gaya operasi. Berupa cara yang ditempuh oleh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan suatu tanggung jawabnya meliputi perorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia dan memperhatikan arahan yang dilakukan oleh pimpinan.

Untuk menentukan dan menilai efektivitas sistem pengendalian internal kredit pada bagian lingkungan pengendalian meliputi:

1. Integritas dan nilai-nilai etika di terapkan dan dilakukan dengan cara:

- a) Mengadakan tindakan manajemen untuk meminimalisir penyebab pegawai yang bertindak tidak jujur, melanggar hukum atau tidak etis

- b) Pelaksanaan peraturan kinerja dan disiplin kerja
 - c) Penegakan peraturan-peraturan tertulis dan tidak tertulis pada koperasi
2. Komitmen terhadap kompetensi dapat dilakukan dengan cara:
- a) Dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dalam mengawasi pengembangan dan kinerja pengendalian internal
 - b) Pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas
 - c) Pertimbangan yang dilakukan oleh manajemen terhadap tingkat kompetensi dari pekerjaan tertentu
3. Filosofi dan gaya operasi dapat dilakukan dengan cara:
- a) Penegasan sifat dari manajemen yang bersifat pengambilan resiko dari suatu perusahaan
 - b) Bertanggung jawab pengawasan dari dewan direksi dalam suatu perusahaan
4. Struktur organisasi
- a) Pembatasan garis tanggung jawab dan wewenang yang ada
 - b) Penghubung antara garis arus komunikasi pada perusahaan

- c) Digunakan untuk menghindari adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh satu orang

5. Kebijakan dan paktek sumber daya manusia

- a) Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian
- b) Menyusun deskripsi tugas pegawai pada masing-masing bagian
- c) Pelaksanaan prosedur sumber daya manusia dimulai pada saat pengangkatan karyawan

b) Penilaian Resiko

Berdasarkan rumusan COSO, bahwa penilaian resiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai resiko terhadap pencapaian tujuan. Resiko itu dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan resiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas di anggap relatif terhadap toleransi resiko yang ditetapkan, maka dari itu penilaian resiko harus dikelola oleh organisasi. Jadi setiap suatu perusahaan yang berdiri harus menyadari bahwa terdapat resiko yang harus dihadapinya. Oleh karena itu koperasi harus menetapkan tujuan yang harus dikedepankan dengan bagian kegiatan keuangan serta bagian kegiatan lainnya agar dapat sejalan secara kompak dan

terorganisasi. Koperasi juga mempertimbangkan bagaimana mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan bagaimana cara memecahkan masalah untuk jalan keluar resiko yang terkait, dengan adanya suatu penilaian resiko ini dapat teridentifikasi dan dapat dianalisis sehingga kita dapat memperkirakan tindakan apa yang harus diperlukan apabila terjadi permasalahan dan bagaimana cara untuk meminimalisirkannya. Menurut (Tunggal, 2013) menyebutkan bahwa penilaian resiko manajemen harus mencakup pertimbangan-pertimbangan khusus terhadap resiko yang timbul dari perubahan keadaan seperti:

1. Personil baru

- a) Pelaksanaan pemantauan terkait dengan perekrutan karyawan baru
- b) Menentukan tujuan dengan kejelasan agar identifikasi dan penilaian resiko dapat berkaitan dengan tujuan


2. Laju pertumbuhan kredit

- a) Perusahaan mengidentifikasi resiko terhadap pencapaian tujuan dan analisis resiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola

3. Teknologi dan sistem informasi

- a) Perusahaan mempertimbangkan potensi kecurangan dalam penilaian resiko terhadap pencapaian tujuan

- b) Kelayakan teknologi dalam pencatatan dalam transaksi
- 4. Kegiatan diluar
 - a) Pelatihan yang diadakan diluar perusahaan
- 5. Piutang tak tertagih
 - a) Bagaimana penerapan dan perlakuan apabila terdapat suatu piutang yang tak tertagih pada anggota koperasi.
- c) Aktivitas Pengendalian



Menurut (COSO: 2013) aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen untuk mengurangi resiko terhadap pencapaian tujuan yang bersifat personel seperti mutasi tugas, cuti wajib, pelimpahan tanggung jawab, dan pemisahan tanggung jawab, pemisahan pada bagian fungsi akuntansi , penyimpanan aset dan suatu operasi dari kantor. Menurut (COSO: 2013) aktivitas pengendalian terdiri dari tiga kelompok yang mempunyai tujuan yaitu:

1. Aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mendorong akurasi seperti: pemisahan tugas dan fungsi, otorisasi yang memadai, dokumentasi yang layak, pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan akuntansi, verifikasi independen atau review atas kegiatan atau pun kinerja

2. Aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mendorong kinerja seperti: evaluasi kinerja
3. Aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mendorong kehandalan proses informasi seperti: pengendalian umum dan pengendalian aplikasi khusus

Untuk menentukan dan menilai efektivitas sistem pengendalian internal kredit pada bagian aktivitas pengendalian meliputi:

1. Penilaian kinerja
 - a) Suatu cara untuk mengukur kinerja suatu perusahaan
 - b) Pemantauan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan
2. Pemrosesan informasi
 - a) Mengidentifikasi terkait dengan pengamanan aset dengan catatan pada perusahaan
 - b) Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan
3. Pengendalian fisik
 - a) Mempertimbangkan potensi untuk penipuan dalam penilaian resiko
 - b) Suatu pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan guna untuk menghindari suatu sabotase yang dilakukan oleh karyawan



- c) Menerapkan suatu prosedur tertentu guna untuk memberikan keamanan secara fisik

4. Pemisahan tugas

- a) Mengidentifikasi dan menilai perubahan yang dapat mempengaruhi pengendalian internal
- b) Melakukan suatu tindakan berupa pemisahan tanggung jawab secara fungsional
- c) Adanya pemisahan yang jelas antara wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan akan mengurangi kesempatan kepada karyawan dalam bentuk otorisasi melakukan transaksi, mencatat transaksi dan memelihara posisi aset

d) Informasi dan Komunikasi

COSO (2013: 5) menjelaskan mengenai komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal dinyatakan bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang bersifat relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain dari pengendalian internal. Informasi ini dapat diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses

komunikasi antar pihak internal maupun pihak eksternal yang dilakukan secara terus menerus, berulang, dan berbagi. Kebanyakan organisasi membangun sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu. Selanjutnya menurut COSO (2013: 7) menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukung komponen informasi dan komunikasi yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi memperoleh ataupun menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal,
2. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi yang berupa tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian internal
3. Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi fungsi pengendalian internal.

e) Pemantauan atau monitoring

(COSO: 2013) Pemantauan atau yang sering disebut monitoring ini merupakan suatu kegiatan untuk mengevaluasi dengan beberapa bentuk apakah sifatnya berkelanjutan, ataupun terpisah keduanya ini digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian

internal mempengaruhi prinsip-prinsip setiap komponen. Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal dan memastikan apakah semuanya sudah dijalankan seperti yang di inginkan. Prinsip prinsip yang mendukung dengan indikator pemantauan COSO 2013 adalah:

1. Organisasi memilih untuk mengembangkan dan melakukan suatu evaluasi yang terus menerus dan atau terpisah untuk memastikan apakah komponen-komponen pengendalian internal sudah adan dan apakah berfungsi
2. Organisasi menegvaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang sesuai dengan tanggung jawab untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki

2.2.3 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2010:163) tujuan dari pengendalian internal adalah sebagai berikut:

- a) Menjaga kekayaan organisasi.

Meliputi Kekayaan fisik suatu perusahaan yang dapat dicuri, dan disalahgunakan karena musibah atau bencana alam, apabila jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian internal yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti aktiva lancar berupa piutang dagang lebih

berpotensi kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga dengan baik.

b) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang dapat diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Beragam informasi akuntansi yang digunakan oleh pihak manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting oleh suatu entitas. Pengendalian internal ini dirancang untuk memberikan jaminan berupa proses pengolahan data akuntansi yang akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang teliti serta andal.

c) Mendorong efisiensi.

Mendorong efisiensi ini ditujukan untuk bagaimana cara mencegah suatu duplikasi usaha yang tidak terlalu diperlukan atau yang bersifat pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien dan efektif.

d) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Untuk mendapatkan pencapaian tujuan suatu perusahaan maka manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur yang di atur oleh perusahaan yang berguna untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh seluruh karyawan.

Untuk mencapai suatu kegunaan maupun tujuan pengendalian internal tersebut maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi

yang benar untuk memberikan suatu bantuan terutama pada menjaga kekayaan suatu perusahaan dengan cara pencatatan aktiva yang baik serta struktur pengendalian suatu perusahaan melemah maka akan menimbulkan suatu permasalahan, ketidakakuratan dan dapat mengalami suatu kerugian bagi pihak perusahaan.

2.3 Efektivitas

2.3.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2016: 134) mengartikan efektif adalah ukuran maupun suatu patokan berhasil tidaknya organisasi untuk mencapai tujuannya. Dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu sifat atau keadaan dimana hasil yang sebenarnya telah mencapai atau melampaui tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain jika hasil yang sebenarnya tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaannya tidak efektif (tidak berhasil).

Heryana dan Andri (2012) efektivitas menitik beratkan pada tingkat keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berarti dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan penilaian efektivitas ini dapat disimpulkan sebagai suatu tingkat sampai dimana tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai.

2.3.2 Efektivitas pengendalian internal kredit

Pengendalian internal menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008 menyatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara berulang maupun terus menerus oleh pimpinan dan semua pegawai untuk memberikan suatu keyakinan untuk memadai atas tercapainya suatu tujuan organisasi dengan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan data pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan peraturan per undang-undangan.

Efektivitas sistem pengendalian internal dapat diartikan sebagai patokan suatu kemampuan sistem pengendalian internal yang sudah direncanakan dan ditetapkan agar mampu untuk mewujudkan suatu tujuan oleh entitas yaitu merupakan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset perusahaan, dan ketaatan peraturan perundang-undangan tersebut secara efektif dan efisien. Tercapainya tujuan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk suatu unsur-unsur sistem pengendalian internal kredit secara lebih efektif dan efisien.

Menurut Mulyono (dalam Affarianiswara, 2010) berikut beberapa indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pengendalian internal sebagai berikut:

- a) Pemberian kredit harus sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan dan dengan prosedur serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh koperasi.
- b) Adanya keamanan kredit.
- c) Adanya keuntungan.
- d) Penggunaan kredit sesuai dengan rencana yang telah diajukan.

- e) Pemberian kredit yang selektif terhadap calon debitur berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan pada koperasi.
- f) Tingkat kolektibilitas kredit yang melunjak tinggi.
- g) Pengembalian jumlah kredit sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditetapkan.

2.4 Kredit

2.4.1 Pengertian Kredit

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain atau peminjam untuk mewajibkan pihak peminjam untuk menlunasi utangnya setelah jangka waktu dan dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”

Berarti dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan penyediaan berupa uang oleh koperasi maupun perbankan, di mana uang tersebut di pinjamkan kepada pihak lain atau yang dimaksudkan adalah calon nasabah (debitur) dengan adanya perjanjian imbalan bagi pihak bank berupa jasa yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak dengan jangka waktu tertentu.

2.4.2 Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir (2012:85) jenis-jenis kredit digolongkan berdasarkan dengan berbagai segi antara lain:

A. Kredit yang dilihat pada segi tujuannya

1) Kredit produktif

Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

2) Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.

3) Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini diberikan kepada supplier perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

B. Kredit yang dilihat dari jangka waktunya

1) Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit jangka menengah

Kredit jangka waktu menengah merupakan kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

3) Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya cukup panjang, yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

C. Kredit yang dilihat dari segi jaminannya

1) Kredit dengan jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau barang tidak berwujud. Berarti, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur.

2) Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau dengan orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

2.4.2 Tujuan kredit

Menurut Kasmir (2014:88) tujuan dilaksanakan pemberian kredit untuk para debitur adalah sebagai berikut:

a) Membantu usaha nasabah (debitur)

Untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana tambahan, baik dana investasi maupun dana usaha modal kerja. Dengan adanya pinjaman dana dari kreditur maka dana tersebut akan dipergunakan untuk memperbesar usaha maupun untuk mengembangkan usahanya.

b) Mencari keuntungan

Dengan adanya pinjaman yang diberikan oleh kreditur, kreditur memperoleh keuntungan berupa hasil pemberian kredit (keuntungan), hasil tersebut berupa bunga yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan oleh nasabah (debitur).

c) Membantu pemerintah

Bagi pihak pemerintah juga akan mendapatkan keuntungan berupa pemberian pajak dari keuntungan yang diperoleh bank atau kreditur, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah barang dan

jasa bahwa sebagian kredit yang disalurkan oleh pihak bank akan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar dimasyarakat.

2.4.3 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Handayani (2012) sebelum memberikan kredit pada debitur, koperasi maupun perbankan harus memberikan sebuah penilaian untuk mendapatkan keyakinan sebuah informasi tentang bagaimana nasabahnya. Pada umumnya untuk menilai kriteria calon nasabah, menerapkan 5C yaitu:

- a) *Character*: adalah analisa atau penilaian terhadap karakter, kepribadian, dan kematangan mental calon nasabah (debitur) dapat diperoleh dari survey lingkungan
- b) *Capacity*: adalah analisa atau penilaian terhadap kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran perbulannya, dapat dilihat dari penghasilan nasabah, dan penghasilan penjamin.
- c) *Capital*: adalah analisis atau penilaian terhadap aset atau kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah (debitur), data tersebut dapat diperoleh dari survey lingkungan, menilai aset dengan barang-barang yang dimiliki oleh nasabah (debitur).
- d) *Condition*: adalah menilai yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dalam membayar angsuran atau kewajiban data dapat diperoleh dari umur calon nasabah (debitur), kondisi keluarga, dan dokumen.

- e) *Collateral*: adalah dengan menilai kemanan dari pinjaman calon nasabah (debitur) data tersebut dapat diperoleh dari siapa yang menggunakan unit, dan atas nama suatu anggaran.

2.4.4 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Munawaroh (2011) untuk mencapai tujuan suatu efektivitas kredit perbankan perlu diterapkan prosedur pemberian kredit yang efektif. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan suatu prioritas kredit yang tepat sasaran, prosedur pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut:

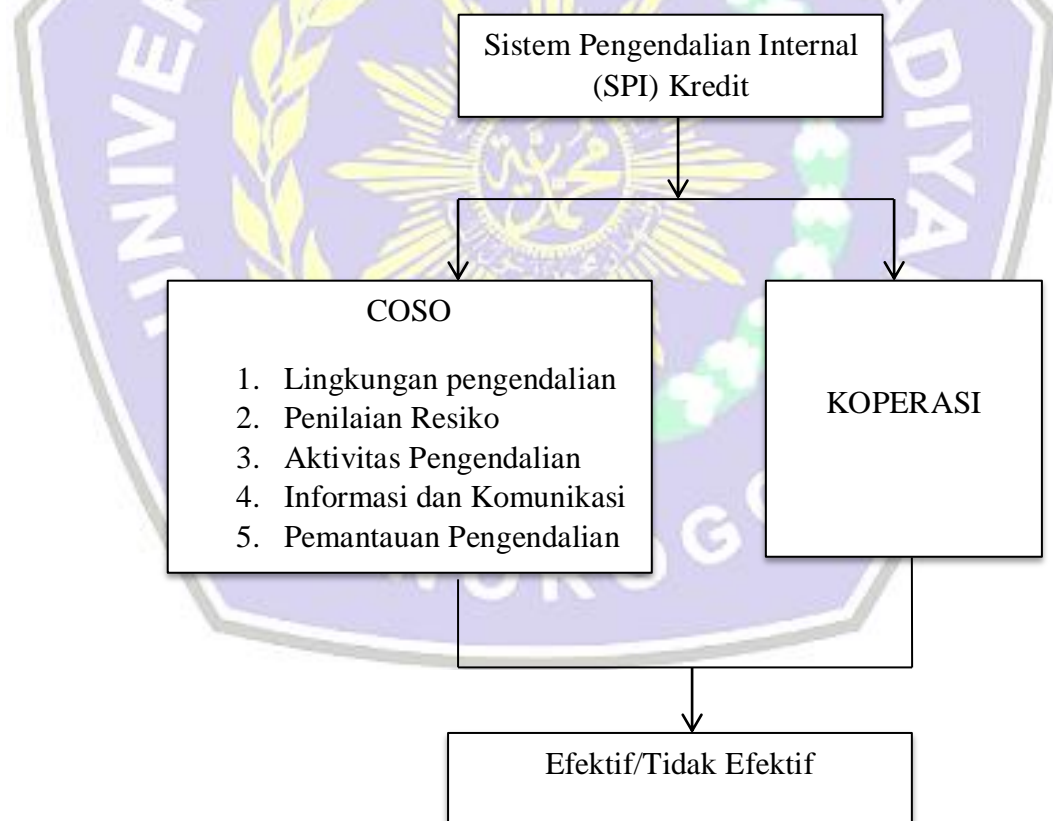
- a) Surat Permohonan kredit
- b) Analisis kredit
- c) Keputusan kredit
- d) Perjanjian kredit
- e) Pencairan kredit

2.5 Kerangka Pemikiran

Setiap perusahaan atau instansi tentunya selalu berusaha untuk selalu mengembangkan diri di tengah persaingan era digital yang sangat ketat, untuk itu perusahaan maupun instansi setiap tahun selalu menyusun strategi untuk mendorong dalam kesuksesan tujuan dalam rangka menghadapi kegiatan operasional tiap tahunnya. Seluruh kegiatan dalam perusahaan harus benar diawasi dan selalu dikontrol dengan benar supaya dapat meminimalisir resiko jika suatu saat perusahaan ada gangguan yang mengacaukan kinerja perusahaan tersebut.

Adanya sistem pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Dengan adanya sistem pengendalian internal ini seluruh kegiatan yang dilakukan oleh instansi maupun perusahaan dapat terawasi secara menyeluruh, dan juga adanya sistem pengendalian internal ini sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat terlindungi secara baik oleh karena itu dapat memperkecil permasalahan penyalahgunaan dan penyelewengan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya, penulis dapat merumuskan untuk penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Model Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: Data diolah 2021

Uraian kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:

1. Peneliti memberikan penjelasan mengenai sistem pengendalian internal kredit pada koperasi.
2. Melakukan efektivitas penerapan terkait dengan sistem pengendalian internal kredit berdasarkan dengan teori dari COSO 2013.
3. Peneliti memberikan kesimpulan berupa efektif atau tidak efektif dari sistem pengendalian internal kredit di koperasi karyamadya kencana.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS, TAHUN, JUDUL	VARIABEL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Khusnul et al, 2017, Efektivitas Pengendalian Internal Kredit Pada KPRI Universitas Jember	Pengendalian Internal Kredit	Kualitatif	Secara garis besar pengendalian internal yang ada di KPRI Universitas Jember sudah cukup baik dan berjalan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya lima komponen pengendalian internal menurut COSO
2	Wijoyo Hadion, 2020 , Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indomitra Mandiri	Pengendalian internal	Kualitatif	Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada PT. Indomitra Mandiri yaitu pihak bank tidak terlalu konsisten dalam penerapan 5C.

3	Syam shofiana, 2020, Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penjualan Kredit Berdasarkan Kerangka COSO Pada PT Bussan Auto Finance Makassar 2	Pengendalian intern penjualan kredit	Deskriptif Kualitatif	Sistem pengendalian intern penjualan kredit berdasarkan kerangka Coso pada PT Bussan Auto Finance Makassar 2 sudah sesuai dengan kerangka COSO dengan tercapainya suatu tujuan organisasi yang melalui unsur-unsur di dalamnya yang mencakup lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian resiko, pemantauan atau monitoring, serta informasi dan komunikasi yang sudah sesuai di perusahaan.
4	Taroreh R. Jeffry, Jessy D.L Warongan, dan Treesje Runtu, 2016 , Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada PT.Mandiri Tunas Finance Cabang Manado	Pengendalian internal piutang	Deskriptif kualitatif	Sistem pengendalian internal piutang usaha PT Mandiri Tunas Finance Cabang Manado sudah berjalan dengan baik, dimana perusahaan sudah menerapkan konsep dasar dan prinsip prinsip pengendalian internal menurut kerangka COSO, Namun terdapat beberapa prosedur yang belum mencerminkan pengendalian internal. Pada bagian piutang tak tertagih belum adanya tindakan oleh perusahaan dalam menangani piutang tak tertagih tersebut.
5	Tjodi Andi Maunjung , David Paul Elia Saerang ,dan Meily Yoke Besty Kalolo, 2017 , Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada PT.Bank Sulutgo	Pengendalian Internal Piutang Usaha	Kualitatif	Secara keseluruhan sistem pengendalian internal atas piutang usaha pada PT. Bank SulutGo KCP Ranotana berjalan cukup efektif, pihak manajemen bank telah menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal menurut COSO. Sistem dan prosedur yang memadai yang dimiliki oleh bank serta ditunjang dengan karyawan-karyawan yang berkompeten membuat tingkat kesalahan yang signifikan atas pengendalian piutang dapat diatasi dengan cepat.

Sumber : Penelitian terdahulu